GOOD GOVERNANCE
Available at : https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/gg
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
p-ISSN : 1412-4246
e-ISSN : 2654-8240

Implementasi Kerja Sama *Sister City* Bandung dan Melbourne Melalui Program *Melbourne–Bandung Food Waste Challenge 2025*

Asri Nadia Gaisani*, Nur Luthfi Hidayatullah
Program Studi Hubungan Internasional UIN Sunan Ampel Surabaya
asrinadiag@gmail.com

Abstract

Food waste is one of the urban environmental issues that requires, cross sectoral managenet. This study analyzes the Bandung-Melbourne sister city collaboration through the Melbourne-Bandung Food Waste Challenge 2025 program, using the policy procces framework by Sebastian Paulo, which includes problem definition, agenda setting, negotiation and policy formulation, and implementation. This study employs a qualitative method, utilizing data collection techniques such as in depth interviews with the head of the Foreign Cooperation Facilitation Theam at the Bandung Secretariat who plays a key role in facilitating collaboration beetween stakeholders from Bandung and Melbourne, as well as program documentation, official sorces, and related news. The reseach findings indicate that cooperation in food waste management evolved from a shared concern about food waste, which was subsequently formalized into a collaborative program involving city governments, startups, business operators, academic, and the community. This study demonstrate that the Bandung-Melborne sister city partnership, through the collaborative Melbourne-Bandung Food Waste Challenge 2025 program, is implemented through local government facilitation, crossstakeholders coordination, and resource management within a collaborative policy making process
Keywords: *Sister city; Local government; Collaborative governance; Policy Process, Urban governance*

Abstrak

Limbah makanan (*food waste*) merupakan salah satu permasalahan lingkungan perkotaan yang membutuhkan penanganan kolaboratif lintas sektor. Penelitian ini menganalisis proses kerja sama sister city Bandung-Melbourne melalui program Melbourne-Bandung Food Waste Challenge 2025 menggunakan kerangka tahapan proses kebijakan yang dikemukakan Sebastian Paulo, yang meliputi pendefinisian masalah, penentuan agenda, negosiasi dan pembuatan kebijakan serta implementasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalaui wawancara mendalam bersama Ketua Tim Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Setda Kota Bandung sebagai salah satu bagian yang memfasilitasi kerja sama para pihak dari Bandung dan Melbourne, serta dokumentasi program, sumber resmi, dan berita terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama pengelolaan limbah makanan berkembang dari kesamaan perhatian terhadap isu food waste yang kemudian dirumuskan dalam program kolaboratif yang melibatkan pemerintah kota, perusahaan startup, pelaku usaha, akademisi dan komunitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama sister city Bandung-Melbourne melalui program kolaborasi Melbourne–Bandung Food Waste Challenge 2025 dilaksanakan melalui fasilitasi pemerintah daerah, koordinasi lintas aktor, dan pengelolaan sumber daya dalam proses kebijakan kolaboratif.
Kata Kunci: Kota kembar, Pemerintah Daerah, Tata kelola kolaboratif, Proses Kebijakan, Tata kelola perkotaan.

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan perkotaan menjadi salah satu tantangan yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan kota dan meningkatnya aktivitas masyarakat. Kota-kota saat ini tidak hanya menghadapi persoalan kepadatan penduduk, tetapi juga tekanan terhadap sistem lingkungan, seperti meningkatnya volume sampah dan limbah makanan (*food waste*). Limbah makanan merupakan salah satu isu lingkungan perkotaan yang semakin mendesak untuk ditangani. United Nations Environment Programme

(UNEP) dalam *Food Waste Index Report 2024* menegaskan bahwa limbah makanan menjadi kontributor signifikan yang memiliki dampak lingkungan serius, terutama dalam peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemborosan sumber daya alam(United Nations Environment Programme, 2024). Pengelolaan limbah makanan tidak lagi dipahami sebatas persoalan teknis yang hanya berfokus pada pengangkutan dan pembuangan sampah, melainkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keberlanjutan perkotaan. Limbah makanan berasal dari berbagai sektor, mulai dari rumah tangga, pasar, hingga industri jasa makanan dan transportasi. Sehingga dalam pengelolaannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak yang menuntut pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai aktor dan lintas sektor, termasuk kerja sama untuk menghasilkan solusi dalam pengelolaannya.

Kebutuhan terhadap kerja sama tersebut mendorong pemerintah kota untuk menjalin kolaborasi dengan kota lain di tingkat internasional untuk membuka peluang pertukaran pengetahuan dan pengalaman kota lain yang telah lebih maju dalam mengelola permasalahan serupa, khususnya dalam mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan. Kerja sama ini menjadi sarana untuk mengakses *best practices* dan inovasi yang dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan lokal, termasuk yang dihadapi oleh Kota Bandung, Indonesia dalam upaya menangani persoalan *food waste* yang terus muncul dari berbagai aktivitas perkotaan.

Di Kota Bandung, perkembangan aktivitas ekonomi, pariwisata, dan sektor jasa turut mendorong meningkatnya *food waste* yang berasal dari berbagai sumber, seperti rumah tangga, restoran, pasar tradisional, hingga maskapai penerbangan. Komposisi sampah di Bandung sendiri didominasi oleh limbah organik sekitar 42% dari total timbulan sampah kota, yang kontribusi terbesarnya di dominasi dari sisa makanan(Amaranti, Achiraeniwati, As'ad, & Nasution, 2016). Dominasi ini sebagian besar dihasilkan dari sektor rumah tangga yakni mencapai 66,8% dari total *food waste* di Kota Bandung (Sasisuci, Nurhayati, & Nikmawati, 2025). Hal inilah yang kemudian membuat sumber limbah menjadi tersebar sehingga sulit ditangani secara terpisah dan sering kali tercampur dengan sampah anorganik dalam satu sistem pengumpulan. Di sisi lain, pengelolaan sampah organik di perkotaan, termasuk di kota Bandung masih menghadapi kendala dalam pemilahan dari sumber, keterbatasan sistem pengolahan, serta belum optimalnya koordinasi antar pihak terkait, sehingga penanganan *food waste* belum berjalan secara terarah dan efektif (Widarmanti, Rahayu, Adi Wibowo, & Aziz Pratiwi, 2026).

Kondisi ini mendorong pemerintah daerah akan penguatan kapasitas dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan, salah satunya melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah di negara lain. Dalam hubungan internasional kontemporer, pemerintah daerah tidak lagi hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan nasional, tetapi juga menjadi aktor aktif dalam menjalin hubungan dengan pihak asing untuk mendukung pembangunan daerah. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah *sister city*, yaitu kerja sama antarpemerintah daerah dari negara yang berbeda yang bertujuan untuk mendorong pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta pengembangan kapasitas dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.(Kusnetsov, 2015). Kerja sama antarkota melalui skema *sister city* mencerminkan semakin meningkatnya peran pemerintah daerah dalam menjalin hubungan internasional guna mencapai tujuan pembangunan yang tidak selalu dapat diselesaikan secara mandiri. Oleh karena itu, *sister city* penting ditelaah sebagai proses tata kelola, khususnya untuk memahami bagaimana pemerintah daerah membangun agenda bersama, mempertemukan aktor dengan kepentingan yang berbeda, serta mengoordinasikan pelaksanaan program.

Salah satu kerja sama yang dikembangkan melalui skema tersebut adalah hubungan antara Kota Bandung dan Melbourne, Australia. Sebelum hubungan kedua kota diformalkan sebagai kerja sama *sister city*, kota Bandung dan kota Melbourne telah terlibat dalam berbagai kegiatan kolaboratif yang mencakup bidang inovasi, teknologi, pengembangan kapasitas, dan keberlanjutan perkotaan. Berbagai program seperti *Bandung–Melbourne Datathon 2019*, *E-Commerce and Cybersecurity for MSMEs*, *Victoria Cleantech Expo 2021*, hingga *Bandung–Melbourne Innovation Event Social Impact 2022* menunjukkan adanya interaksi yang berkembang secara bertahap antara kedua kota.(Diskominfo Kota Bandung, 2024) Rangkaian kolaborasi tersebut tidak hanya memperkuat hubungan antarpemerintah daerah, tetapi juga mempertemukan berbagai aktor lain seperti akademisi, pelaku usaha, komunitas inovasi, dan organisasi pendukung yang memiliki perhatian terhadap berbagai isu perkotaan.

Dalam perkembangan hubungan antara kota Bandung dan kota Melbourne, kedua kota kemudian memfokuskan agenda kerja sama pada aspek lingkungan yang melibatkan berbagai aktor dari lintas sektor. Pemilihan Kota Melbourne sebagai mitra kerja sama menjadi relevan mengingat kota Melbourne yang telah lebih dulu dan berhasil dalam menangani permasalahan pengelolaan dan pengimplementasian sampah dan limbah organik secara terintegrasi termasuk *food waste*. Kota Melbourne, dikenal sebagai kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah yang lebih tertata, mulai dari pengurangan limbah dari sumber, pemilahan sampah organik, hingga keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha. Upaya ini tentunya didukung oleh kebijakan *Waste and Resource Recovery Strategy 2030* yang mendorong pengurangan sampah dari sumbernya dan peningkatan pemilahan sampah, serta kebijakan yang berfokus pada pengurangan limbah organik dan pengembangan sistem daur ulang.(City of Melbourne, 2019) Selain itu, pengelolaan *food waste* di Melbourne juga didukung oleh program inovasi berbasis kewirausahaan, seperti yang dijalankan oleh Rocket Seeder yang melibatkan *startup* dan pelaku usaha untuk merancang solusi berkelanjutan dalam mengurangi limbah pangan di berbagai tahapan sistem pangan.(Rocket Seeder, n.d.) Ini menjadikan kerja sama antara Kota Bandung dan Kota Melbourne relevan untuk saling berbagi pengalaman dan pembelajaran dalam mengembangkan pendekatan pengelolaan *food waste* yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, kajian mengenai kerja sama *sister city* dalam bidang lingkungan masih cenderung terbatas. Di Indonesia, kajian mengenai kerja sama antar kota dalam bidang lingkungan umumnya berfokus pada aspek teknis, yang lebih menekankan peran pemerintah dan transfer praktik. Kajian bidang lingkungan di Kota Bandung selama ini lebih diarahkan pada pengelolaan air, sehingga pembahasan mengenai *food waste* dalam kerangka kerja sama internasional belum menjadi fokus kajian. Di sisi lain, sebagian besar literatur juga melihat kerja sama *sister city* sebagai hubungan yang dimulai dari kesepakatan formal, sedangkan dalam hubungan antara kota Bandung dan kota Melbourne, kerja sama telah terbangun dan berjalan sebelum hubungan kedua kota ini diformalkan secara resmi hingga kemudian diwujudkan melalui program kerja sama dalam pengelolaan *food waste.* Perkembangan ini kemudian menjadi penting untuk ditelaah dalam memahami bagaimana pemerintah daerah membangun agenda bersama, fasilitasi perumusan program, serta mengkoordinasi berbagai pihak hingga kolaborasi dapat dijalankan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dan Melbourne dalam bidang lingkungan, yang berfokus pada pengelolaan *food waste* melalui program *Melbourne–Bandung Food Waste Challenge 2025* dengan pendekatan kolaboratif lintas aktor. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana kerja sama antar kota dijalankan dalam menghasilkan berbagai upaya penanganan permasalahan lingkungan perkotaan yang semakin kompleks, sekaligus menjadi rujukan bagi pengembangan kerja sama serupa dalam penanganan isu lingkungan perkotaan, khususnya *food waste*.

KAJIAN LITERATUR

Kerja Sama *Sister City*

Dalam hubungan internasional, pemerintah tidak lagi hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan domestik, tetapi juga mulai terlibat secara aktif dalam aktivitas hubungan internasional. Keterlibatan pemerintah daerah ini dipahami sebagai paradiplomasi yang merupakan keterlibatan aktor subnasional, khususnya pemerintah daerah, dalam aktivitas hubungan internasional untuk mendukung kepentingan dan pembangunan daerahnya. Menurut Kusnetsov, paradiplomasi mencerminkan keterlibatan pemerintah daerah dalam komunikasi politik lintas negara yang tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga aktor non-negara, serta mencakup berbagai dimensi kerja sama untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan termasuk lingkungan. (Kusnetsov, 2015) Salah satu bentuk konkret dari paradiplomasi ini adalah kerja sama *sister city* yaitu kerja sama resmi yang dijalankan antara dua pemerintah daerah di negara berbeda dalam jangka waktu yang panjang dan dibangun atas dasar kesamaan atau karakteristik tertentu antara dua kota tersebut (Liu & Hu, 2018). *Sister city* ini menjadikan paradiplomasi dapat dijalankan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Seiring dengan semakin menguatnya peran pemerintah daerah dalam arena internasional, ruang lingkup paradiplomasi juga mengalami perluasan, termasuk pada isu lingkungan. Kusnetsov juga menyebutkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan internasional mencakup berbagai dimensi kebijakan, termasuk dimensi lingkungan.(Kusnetsov, 2015) Di mana isu lingkungan menjadi salah satu agenda strategis yang semakin menonjol Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan tidak lagi semata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga telah menjadi bagian dari peran aktif pemerintah kota dalam merespons tantangan global di tingkat lokal. Dalam praktiknya, kerja sama *sister city* pada bidang lingkungan memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan *best practice* antar kota dalam menghadapi persoalan seperti pengelolaan limbah, perubahan iklim, dan keberlanjutan perkotaan. Kerja sama ini tidak berhenti pada level simbolik, tetapi berkembang menjadi bentuk kolaborasi yang lebih nyata dalam menjawab kebutuhan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks.

Tahapan Proses Kebijakan

Kerja sama internasional, merupakan suatu proses ketika para aktor mulai menyesuaikan perilaku serta kebijakannya dengan pandangan dan kepentingan aktor lain untuk mencapai tujuan bersama. Sebastian Paulo menjelaskan bahwa dalam kerja sama internasional, para aktor tidak hanya berorientasi pada kepentingannya masing-masing, tetapi juga membangun penyesuaian dan koordinasi agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai secara kolektif.(Paulo, 2014) Dalam kerja sama *sister city*, kolaborasi antar pemerintah daerah dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan bersama, termasuk isu lingkungan, melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, maupun implementasi program kerja sama. Kerja sama tersebut pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan dan menjaga *Global Public Goods* (GPGs), yaitu manfaat atau layanan yang dapat dinikmati secara bersama tanpa mengurangi hak pihak lain untuk memperoleh manfaat yang sama. Lingkungan yang bersih dan berkelanjutan menjadi salah satu bentuk GPGs karena manfaatnya tidak terbatas pada satu wilayah saja, melainkan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Paulo membagi proses

kerja sama internasional ke dalam empat tahapan *policy process* yang menggambarkan proses pembentukan hingga implementasi kerja sama antar aktor.

Proses ini berlangsung melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu perumusan masalah (*problem definition*), penetapan agenda (*agenda-setting*), proses negosiasi dan pengambilan keputusan (*negotiation and decision-making*), serta implementasi (*implementation*). Pendekatan ini menunjukkan bahwa suatu kerja sama tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi terbentuk melalui proses yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, dan dinamika yang berkembang di setiap tahapannya.(Paulo, 2014)

Tahap pertama dalam proses kerja sama adalah perumusan masalah (*problem definition*) yang diikuti dengan penetapan agenda (*agenda-setting*), di mana suatu isu terlebih dahulu dikenali dan dipahami sebagai masalah yang memerlukan penanganan bersama. Dalam kerja sama internasional, suatu isu tidak otomatis menjadi prioritas, tetapi perlu didefinisikan sebagai persoalan yang membutuhkan tindakan kolektif, sebelum kemudian didorong masuk ke dalam agenda bersama. Penetapan agenda sendiri merupakan proses ketika isu yang awalnya hanya menjadi bahan pembahasan mulai diarahkan menjadi prioritas yang benar-benar ditindaklanjuti. Proses ini dapat berlangsung dengan berbagai cara, baik dari dalam lingkaran pengambil kebijakan, dorongan dari masyarakat atau jaringan advokasi, maupun inisiatif aktor politik tingkat tinggi. Pada tahap ini, peran berbagai aktor penting dalam membangun kesadaran bersama terhadap masalah sekaligus menghadirkan kemungkinan solusi, karena tanpa hal tersebut, suatu isu akan sulit masuk ke dalam agenda kerja sama. Tahap ini menjadi langkah awal yang menentukan arah kerja sama yang akan dijalankan.

Tahap selanjutnya adalah negosiasi dan pengambilan keputusan (*negotiation and decision-making*), yaitu proses ketika para aktor yang terlibat mulai merumuskan dan menyepakati bentuk kerja sama yang akan dijalankan. Proses ini tidak hanya mengikuti prosedur formal seperti pemungutan suara dengan berbagai mekanisme, tetapi juga sering berlangsung melalui diskusi dan pencarian kesepahaman bersama yang terbentuk secara bertahap. Dalam tahap ini, keputusan yang dihasilkan dapat berupa kesepakatan yang mengikat secara hukum (*hard law*) maupun yang lebih fleksibel (*soft law*). Dalam praktiknya, kedua bentuk tersebut tidak selalu memiliki batas yang jelas, melainkan berada dalam satu rentang dengan tingkat keterikatan yang berbeda dan dapat saling melengkapi.

Tahap terakhir adalah implementasi (*implementation*), yaitu proses ketika keputusan yang telah disepakati mulai dijalankan dalam bentuk kegiatan nyata. Pada tahap ini, implementasi tidak hanya mencakup pelaksanaan program, tetapi juga dapat mencakup penyesuaian atau keputusan lanjutan untuk memperjelas arah kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, implementasi juga melibatkan penggunaan berbagai sumber daya, seperti pendanaan dan tenaga kerja, serta koordinasi antar aktor yang terlibat.

Keseluruhan tahapan ini menunjukkan bahwa kerja sama tidak hanya berhenti pada kesepakatan, tetapi ditentukan oleh bagaimana setiap tahap dijalankan secara berkesinambungan, sehingga dapat menjelaskan secara lebih utuh bagaimana suatu kerja sama benar-benar dijalankan dalam praktik nyata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi serta proses kerja sama sister city kota Bandung dan Melbourne dalam pengelolaan food waste melalui melalui program *Melbourne–Bandung Food Waste*

Challenge 2025. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri bagaimana kerja sama terbentuk melalui pengalaman, interaksi, dan konteks yang melingkupinya (W. Creswell, 2009).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Christine Mugia, Ketua Tim Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Bagian Kerja Sama Setda Kota Bandung yang dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatannya secara langsung dalam fasilitasi kerja sama dan mengkooordinasikan pihak-pihak terkait. Sementara itu, dokumentasi mencakup dokumen internal dari Bagian Kerja Sama Setda Kota Bandung, Rocket Seeder, dan Pemerintah Kota Melborne seperti *overview* kegiatan, *timeline* pelaksanaan, dan data partisipan dalam program *Melbourne–Bandung Food Waste Challenge* 2025. Data juga dilengkapi dengan sumber dokumentasi eksternal seperti pemberitaan media, dan literatur ilmiah yang relevan.

Data kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data dikelompokkan berdasarkan tahapan *policy process* Sebastian Paulo untuk mengidentifikasi pola dan keterkaitan antar temuan. Selanjutnya, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan wawancara dan dokumentasi untuk menilai konsistensi informasi serta memastikan temuan didukung oleh bukti yang tersedia sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai implementasi kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dan Kota Melbourne dalam bidang lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerja Sama Bandung - Melbourne dan Perkembangannya

Hubungan kerja sama antara kota Bandung dan kota Melbourne berkembang secara bertahap melalui berbagai bentuk interaksi dan kolaborasi yang telah berlangsung sebelum kedua kota menjalin kerja sama *sister city* secara formal (Nadia, 2026). Kesamaan karakteristik kedua kota sebagai pusat pendidikan, inovasi, pengembangan *startup*, serta pemanfaatan teknologi dalam tata kelola perkotaan menjadi faktor yang mendorong terbangunnya hubungan antarkota hingga membuka potensi kerja sama bagi kedua kota untuk saling bertukar pengalaman dan mengembangkan berbagai bentuk kolaborasi dalam menjawab tantangan pembangunan perkotaan. Kerja sama kedua kota ini terus berkembang secara bertahap dan terus mengalami penguatan seiring dengan meningkatnya kebutuhan kolaborasi antar kota. Komitmen tersebut tercermin melalui penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) *city-to-city cooperation* pada tahun 2019 sebagai momentum awal yang memperkuat hubungan kedua kota (Diskominfo Kota Bandung, 2024). Kesepahaman tersebut dibuat sebagai landasan awal bagi pengembangan kerja sama yang lebih luas antara kedua kota, khususnya dalam bidang inovasi, pengembangan kapasitas, pemanfaatan teknologi, serta pertukaran pengetahuan untuk mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Pasca penandatanganan LoI, hubungan kedua kota mulai diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, serta komunitas inovasi dari kedua kota. Pada tahun 2019, kedua kota menyelenggarakan *Bandung–Melbourne Datathon* yang berfokus untuk mencari solusi atas permasalahan perkotaan berbasis data dan teknologi. Melalui kegiatan ini, pemenang dari Kota Bandung memperoleh kesempatan mengikuti program inkubasi di Melbourne sebagai bagian dari pertukaran pengetahuan dan pengembangan kapasitas (Sekilas Jabar, 2019). Selanjutnya, pada tahun 2020 kerja sama diperluas melalui *Webinar on Respective Responses to the COVID-19 Situation in West Java and Melbourne* sebagai sarana berbagi pengalaman dalam menghadapi pandemi Covid-19. Di tahun yang sama, kerja

sama melalui program *E-Commerce and Cybersecurity for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)* juga dilakukan bersama Department of Foreign Affairs and Trade Australia, Pemerintah Negara Bagian Victoria, dan Pemerintah Kota Melbourne guna meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi digital dan keamanan siber.(Diskominfo Kota Bandung, 2024)

Kerja sama kedua kota terus berkembang melalui partisipasi Bandung dalam *Victoria Cleantech Expo* tahun 2021 yang berfokus pada inovasi dan teknologi ramah lingkungan, serta penyelenggaraan *Bandung–Melbourne Innovation Event Social Impact* pada tahun 2022 yang mempertemukan berbagai aktor inovasi untuk mengembangkan solusi atas berbagai persoalan sosial dan perkotaan.(Diskominfo Kota Bandung, 2024) Berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua kota tidak hanya berkembang melalui hubungan formal antarpemerintah, tetapi juga melalui keterlibatan berbagai aktor lintas sektor dalam pengembangan inovasi, peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan.

Hubungan Bandung - Melbourne kemudian memasuki tahap yang lebih formal melalui penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Melbourne pada 22 April 2024 di Melbourne Town Hall, Australia. MSP tersebut mencakup lima bidang kerja sama utama, yaitu *smart city*, ekonomi dan perdagangan, pendidikan tinggi, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta kota layak huni dan ketahanan kota. Penandatanganan MSP ini menunjukkan perkembangan kemitraan antarkota yang lebih luas dan berorientasi jangka panjang.(Diskominfo Kota Bandung, 2024)



Gambar 1. *Penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Pemda Kota Bandung dan Pemerintah Kota Melbourne mengenai Kerja Sama Antarkota di Melbourne Townm Australia, Senin (22/5/2024). Sumber: Portal Jabarprov (Kota Bandung dan Melbourne Jalin Kerja Sama di Sejumlah Bidang)*

Sejak tahun 2019, kerja sama *sister city* Bandung-Melbourne berkembang melalui berbagai bentuk pertukaran dan kolaborasi, seperti pertukaran pengetahuan (*knowledge exchange*), pengembangan kapasitas (*capacity building*), serta kolaborasi inovasi perkotaan yang melibatkan berbagai aktor di luar pemerintah daerah. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Kuznetsov mengenai paradiplomasi yang menekankan bahwa hubungan internasional pemerintah daerah tidak hanya melibatkan pemerintahan, tetapi juga aktor non-negara dalam mendukung tujuan pembangunan daerah (Kusnetsov, 2015). Pada fase awal hubungan kedua kota berfokus pada pengembangan inovasi, teknologi, dan peningkatan kapasitas, seiring berjalannya waktu fokus tersebut meluas pada aspek keberlanjutan kota termasuk lingkungan. Rangkaian kegiatan yang telah dijalankan tidak hanya memperkuat hubungan antarkota dan memperluas ruang kolaborasi, tetapi juga mencerminkan komitmen kedua pihak untuk terus menyesuaikan bentuk kemitraan

dengan kebutuhan serta tantangan pembangunan yang dihadapi. Dinamika ini membuka peluang kolaborasi yang lebih spesifik, termasuk yang berkaitan dengan isu keberlanjutan lingkungan.

Tahap *Problem Definition* dan *Agenda Setting* dalam Penetapan *Food Waste* sebagai Agenda Kerja Sama Bandung dan Melbourne

Hubungan Bandung-Melbourne, perhatian terhadap isu-isu keberlanjutan perkotaan muncul seiring dengan intensifnya berbagai bentuk kerja sama yang telah terjalin sebelumnya dalam bidang inovasi, teknologi, pengembangan kapasitas, dan keberlanjutan perkotaan. Berbagai interaksi tersebut mulai mengarahkan perhatiannya pada isu-isu yang dipandang memiliki relevansi dan manfaat bersama untuk ditindaklanjuti secara lebih spesifik, salah satunya adalah mengenai keberlanjutan lingkungan perkotaan yang difokuskan pada pengelolaan sampah khususnya *food waste*.

Dalam upaya mewujudkan keberlanjutan perkotaan, permasalahan pengelolaan sampah perkotaan menjadi salah satu tantangan lingkungan yang semakin mendapat perhatian, khususnya di Kota Bandung. Permasalahan ini terlihat dari tingginya volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Tercatat bahwa produksi sampah Kota Bandung mencapai sekitar 1.500 ton per hari yang didominasi oleh sampah organik dan sisa makanan(Humas Kota Bandung, 2024). Sampah makanan tersebut berasal dari berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari rumah tangga, pasar tradisional, restoran, hotel, *food court*, jasa makanan bahkan maskapai penerbangan. Tingginya timbulan sampah organik tersebut menunjukkan bahwa *food waste* menjadi salah satu penyumbang utama persoalan sampah perkotaan di Kota Bandung, terutama seiring berkembangnya aktivitas konsumsi masyarakat serta pertumbuhan sektor jasa dan pariwisata perkotaan yang dihadapi dengan keterbatasannya sistem pengelolaan (Sasisuci et al., 2025) .

Namun, tingginya timbulan *food waste* belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai. Pengelolaan sampah di Kota Bandung masih mengalami keterbatasan pada sistem kumpul-angkut-buang menuju tempat pembuangan akhir (*landfill*) sehingga sampah makanan yang seharusnya dapat dipilah dan diolah bercampur dengan jenis sampah lainnya. Sebagian besar sampah makanan masih langsung dibuang bersama sampah campuran lainnya dan berakhir di tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pengolahan yang lebih berkelanjutan(Sasisuci et al., 2025). Kondisi ini kemudian berdampak pada lingkungan perkotaan secara lebih luas. Isu *food waste* ini menjadi salah satu persoalan global yang berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemborosan sumber daya alam, di mana limbah makanan yang menumpuk di tempat pembuangan akhir dapat menghasilkan gas metana yang menjadi salah satu penyumbang emisi dari sektor limbah (United Nations Environment Programme, 2024). Menunjukkan bahwa *food waste* telah berkembang menjadi bagian dari isu keberlanjutan lingkungan yang membutuhkan perhatian lebih luas.

Perhatian terhadap persoalan *food waste* tidak hanya terlihat di Kota Bandung, tetapi juga di Kota Melbourne sebagai salah satu kota yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Kota Melbourne menempatkan pengelolaan limbah dan pemanfaatan sumber daya secara efisien sebagai bagian penting dari kebijakan lingkungannya melalui kebijakan *Waste and Resource Recovery Strategy 2030,* yang mendorong pengurangan sampah dari sumbernya, peningkatan pemilahan limbah, dan pengembangan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah perkotaan.(City of Melbourne, 2019) Strategi ini menjadi solusi pengelolaan limbah organik dan pengurangan *food waste* dalam upaya mewujudkan sistem perkotaan yang lebih berkelanjutan.

Hal ini menunjukkan bahwa baik kota Bandung dan kota Melbourne sama-sama memiliki perhatian terhadap persoalan *food waste* sebagai bagian dari tantangan keberlanjutan lingkungan perkotaan dengan kondisi yang berbeda. Pada saat ini Bandung masih menghadapi tantangan pengelolaan limbah makanan yang tinggi, sementara Melbourne memiliki pengalaman dan kebijakan yang lebih berkembang dalam pengelolaan limbah organik. Meskipun demikian, kedua kota sama-sama bertujuan untuk mengembangkan pengelolaan limbah makanan yang lebih efektif dan berkelanjutan. *Food waste* tidak lagi dipahami hanya sebagai persoalan teknis kebersihan kota, tetapi berkembang menjadi isu keberlanjutan lingkungan yang berkaitan dengan peningkatan emisi gas rumah kaca, pemborosan sumber daya, dan dampak lingkungan perkotaan yang lebih luas.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Christine Mugia, selaku ketua Tim Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Bagian Kerja Sama Setda Kota Bandung yang merupakan salah satu fasilitator kerja sama kedua kota, pemilihan *food waste* sebagai fokus kerja sama tidak hanya dipengaruhi oleh meningkatnya perhatian kedua kota terhadap isu lingkungan, tetapi juga oleh perkembangan hubungan kerja sama yang telah terbangun melalui berbagai program kolaboratif pada periode sebelumnya, salah satunya dalam kolaborasi *Victoria Cleantech Expo* tahun 2021 yang memperkenalkan berbagai inovasi dan teknologi ramah lingkungan yang dikembangkan untuk menjawab tantangan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan (Victorian Cleantech Cluster, 2021). Disampaikan bahwa, kerja sama pada bidang lingkungan, khususnya *food waste* ini, merupakan bagian dari agenda kerja sama yang telah dirancang oleh kedua kota pada periode sebelumnya dalam kerangka pengembangan hubungan *sister city* Bandung-Melbourne. Berbagai kolaborasi yang sebelumnya dijalankan dalam bidang inovasi, teknologi, pengembangan kapasitas, dan keberlanjutan perkotaan turut memperluas interaksi serta pertukaran pengetahuan antara kedua kota mengenai berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi bersama. Dalam perkembangan tersebut, usulan untuk mengembangkan kerja sama yang berfokus pada pengelolaan *food waste* pertama kali disampaikan oleh Pemerintah Kota Melbourne dan kemudian memperoleh respons positif dari Pemerintah Kota Bandung karena dinilai sejalan dengan kebutuhan serta prioritas yang berkembang di kedua kota (Mugia, 2026).

Dalam tahapan *problem definition* dan *agenda setting*, penetapan *food waste* sebagai agenda kerja sama Bandung-Melbourne berkembang seiring dengan perkembangan hubungan kerja sama antara kedua kota yang sebelumnya telah terbangun melalui berbagai program kolaboratif di bidang inovasi, teknologi, pengembangan kapasitas, dan keberlanjutan perkotaan termasuk *Victorian Cleantech Expo* 2021. Inisiatif kota Melbourne dalam mengembangkan kerja sama pada bidang *food waste* kemudian memperoleh respons positif dari Pemerintah Kota Bandung yang tengah menghadapi persoalan pengelolaan sampah *food waste* memberikan titik temu dengan prioritas keberlanjutan yang juga berkembang di Kota Melbourne. Proses ini memperlihatkan bahwa pembentukan agenda tidak hanya bergantung pada pihak yang mengusulkan isu, tetapi juga pada penerimaan mitra dan kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, hubungan antarpemerintah kota dan fasilitasi Bagian Kerja Sama Setda Kota Bandung menjadi jalur kelembagaan yang mendukung pengembangan agenda tersebut.

Dalam perspektif Paulo, kondisi ini menunjukkan tahap *agenda setting*, ketika *food waste* yang telah dikenali sebagai masalah bersama mulai memperoleh perhatian lebih besar dan dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti melalui kerja sama. Tahap ini menjadi dasar bagi pembahasan bentuk kolaborasi pada tahap berikutnya.

Tahap *Negotiation* dan *Decision Making* dalam Perumusan *Melbourne–Bandung Food Waste Challenge 2025*

Setelah *food waste* disepakati sebagai agenda bersama, pembahasan kemudian berfokus pada penentuan bentuk kerja sama yang dapat dikembangkan untuk merespons isu tersebut. Kedua kota mulai membahas dan mempertimbangkan bentuk kolaborasi yang inovatif dan melibatkan berbagai aktor terkait dengan pengelolaan *food waste*. Di sini, pemerintah kota Melbourne menginisiasi penggunaan Rocker Seeder sebagai fasilitator pihak ketiga untuk mendukung pengembangan program dan mempertemukan pemerintah dengan aktor lainnya yang terkait. Keterlibatan *startup*, pelaku usaha, akademisi, dan organisasi pendukung memperluas proses perumusan dari pembahasan antarpemerintah menjadi identifikasi persoalan dan peluang solusi berdasarkan kebutuhan sektor terkait (Mugia 2026, Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bandung 2025)

Diskusi dan pembahasan ini kemudian menghasilkan *Melbourne–Bandung Food Waste Challenge 2025* yang dirancang sebagai wadah kolaboratif untuk mengembangkan solusi pengelolaan sampah makanan melalui keterlibatan *start up,* pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dari kedua kota dalam mengembangkan solusi inovatif terkait pengelolaan limbah makanan (Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bandung, 2025). Pemilihan mekanisme *challenge* atau kompetisi dalam kolaborasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua kota memiliki potensi inovasi yang cukup kuat, termasuk keberadaan berbagai *startup* dan pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan sampah dan keberlanjutan lingkungan. Keterlibatan *i* berkontribusi dalam mengembangkan solusi terhadap persoalan *food waste* (Mugia, 2026). Menjadikan program tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran pengetahuan, tetapi juga sebagai wadah untuk menghasilkan inovasi yang berpotensi memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua kota.

Dalam perumusan program, Rocket Seeder memfasilitasi berbagai diskusi antara pemerintah kota, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menentukan bentuk program yang paling sesuai serta sektor yang menjadi prioritas kolaborasi. Dalam perumusannya, menghasilkan tiga sektor prioritas yang dianggap memiliki kontribusi signifikan terhadap timbulan *food waste* sekaligus berpotensi menjadi ruang pengembangan solusi kolaboratif antara kedua kota. Tiga sektor utama yang menjadi fokus program yaitu hospitality, pasar pangan segar, dan penerbangan. Untuk memahami permasalahan yang dihadapi pada masing-masing sektor, program ini melibatkan sejumlah mitra dari masing-masing kota yang merepresentasikan aktivitas di bidang tersebut. Pada sektor hospitality, misalnya, keterlibatan Showtime Events Group dari Melbourne dan Destiny Catering Group dari Bandung memberikan gambaran mengenai tantangan pengelolaan *food waste* pada industri katering. Sementara itu, Queen Victoria Market dan Pasar Kosambi menjadi representasi sektor pasar pangan segar yang menghadapi persoalan limbah dari aktivitas perdagangan bahan makanan. Adapun keterlibatan Garuda Indonesia dari kedua kota memberikan gambaran mengenai timbulan *food waste* yang dihasilkan dalam layanan transportasi udara. Sektor-sektor tersebut dipilih untuk proses pencarian kesepahaman bersama dalam menentukan bidang yang dianggap paling relevan untuk dikembangkan dalam kerja sama kedua kota (Mugia, 2026).




Gambar 2&3. *Sesi Mentoring dan Diskusi Pelaksanaan Melbourne-Bandung Food Waste Challenge 2025 Sumber: Instagram @kerjasama.bdg*

Dalam tahapan *negotiation* dan *decision making*, perumusan *Melbourne-Bandung Food Waste Challenge* 2025 tercermin melalui serangkaian diskusi dan komunikasi yang melibatkan berbagai aktor untuk merumuskan bentuk kolaborasi yang dianggap paling sesuai dalam menjawab persoalan *food waste*. Penunjukan Rocket Seeder sebagai fasilitator program, serta penetapan sektor *hospitality*, pasar pangan segar, dan penerbangan sebagai fokus kolaborasi memberikan arah bagi pengembangan solusi pengelolaan food waste pada aktivitas usaha yang berbeda sekaligus menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan solusi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor. Hal ini memperlihatkan bagaimana agenda pengelolaan *food waste* diterjemahkan menjadi bentuk kerja sama yang melibatkan berbagai aktor baik pemerintah maupun nonpemerintah.

Implementasi *Melbourne–Bandung Food Waste Challenge 2025*

Tahap implementasi kerja sama ini diwujudkan melalui pelaksanaan program *Melbourne–Bandung Food Waste Challenge 2025* yang menjadi bentuk nyata dari kesepakatan kedua kota dalam kerja sama kolaboratif untuk mengembangkan solusi inovatif dalam pengelolaan *food waste*. Melalui program tersebut, berbagai keputusan yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya mulai diaktualisasikan ke dalam rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mendorong pengembangan dan pengujian solusi terhadap persoalan *food waste* di kedua kota (*Melbourne-Bandung Food Waste Challenge Overview*, 2025).

Dalam pelaksanaannya, program ini dijalankan secara bertahap di Kota Bandung dan Kota Melbourne melalui kombinasi kegiatan daring dan luring dengan peranan Rocket Seeder sebagai pihak fasilitator dan penyelenggara program yang berperan dalam melakukan sosialisasi, membuka proses rekrutmen peserta, sekaligus menghubungkan peserta dengan sektor-sektor yang menjadi fokus program, mentoring, sampai pendampingan ke tahap *pitching* (Mugia, 2026). Program ini juga melibatkan berbagai bentuk pendampingan, pengembangan solusi, hingga pengujian gagasan bersama mitra industri untuk menghasilkan pengembangan solusi yang lebih aplikatif dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan perkotaan (*Melbourne-Bandung Food Waste Challenge Overview*, 2025).

Program ini membuka pendaftaran bagi *startup*, *social enterprise*, peneliti, mahasiswa, alumni, serta pelaku usaha dari kedua kota yang memiliki gagasan maupun inovasi dalam pengelolaan *food waste* (Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bandung, 2025). Dalam pengembangannya, setiap sektor melibatkan mitra industri dari kedua kota sebagai pihak yang memberikan gambaran persoalan lapangan untuk pengembangan solusi yang lebih aplikatif (*Melbourne-Bandung Food Waste Challenge Overview*, 2025). Setelah proses seleksi, program kemudian dilanjutkan melalui berbagai tahapan kegiatan seperti *industry briefing*, *industry tour*, sesi mentoring mingguan, lokakarya daring, sesi jejaring

antarpeserta, hingga *pitching session* yang dilaksanakan di Bandung dan Melbourne (*Melbourne-Bandung Food Waste Challenge Overview*, 2025) Melalui tahapan tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai tantangan pengelolaan *food waste* pada masing-masing sektor sekaligus mengembangkan solusi yang dapat diterapkan dalam praktik pengelolaan limbah makanan (Mugia, 2026). Program ini kemudian diarahkan pada pengembangan solusi yang dapat diuji secara langsung melalui skema *pilot project* bersama mitra industri sebagai bagian dari pengembangan solusi yang lebih aplikatif dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan perkotaan (Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bandung, 2025).

Pelaksanaan tahapan tersebut melibatkan koordinasi antara Rocket Seeder, peserta, dan mitra industri yang memungkinkan pengembangan solusi tidak hanya bertumpu pada gagasan peserta, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan sektor yang menjadi sasaran program. Rocket Seeder memfasilitasi proses perekrutan, pendampingan, serta pengembangan jejaring, sedangkan mitra industri memberikan informasi mengenai persoalan sektoral yang menjadi sasaran program. Sementara itu, peserta mengembangkan gagasan menjadi solusi berdasarkan tantangan yang diidentifikasi selama program. Pembagian fungsi ini menghubungkan kebutuhan industri dengan proses pengembangan inovasi, sehingga pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan kegiatan, tetapi juga pada pengembangan solusi yang relevan dengan persoalan di lapangan.

Implementasi program juga turut didukung oleh berbagai institusi pendidikan, komunitas, organisasi keberlanjutan, hingga jaringan inovasi dari kedua kota. Dari pihak Melbourne, dukungan diberikan oleh Deakin University, RMIT Activator, Monash Sustainable Development Institute, Australian Café and Restaurant Association, Circular Economy Victoria, dan Regen Melbourne. Sementara dari pihak Bandung, program turut didukung oleh The Greater Hub ITB, Startup Bandung, dan Greeneration Foundation. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk pengembangan jejaring inovasi, pendampingan peserta, promosi program, hingga penyediaan ruang kolaborasi bagi peserta yang terlibat dalam program (Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bandung, 2025). Keberadaan jaringan pendukung ini memperluas akses peserta terhadap keahlian dan pendampingan yang dibutuhkan dalam pengembangan solusi yang dibutuhkan.

Dari proses sosialisasi, seleksi, pendampingan, serta pengembangan dan presentasi solusi bersama mentor dan mitra industri sejak Februari 2025, tiga tim asal Kota Bandung dari berbagai latar belakang yang berbeda dengan gagasan yang relevan terhadap tantangan lingkungan saat ini yaitu Envmission, BIKI (*Bisa Kita*), dan Ngadaur kemudian terpilih untuk mengikuti tahap lanjutan *Melbourne–Bandung Food Waste Challenge 2025* di Melbourne. (Mugia, 2016). Envmission mengembangkan solusi digital pengolahan limbah organik melalui sistem *biochar* dan biogas berbasis komunitas, sementara BIKI menghadirkan teknologi *edible coating* berbahan limbah kulit udang untuk memperpanjang masa simpan produk pangan lokal sekaligus mendukung penguatan UMKM perempuan pada sektor agroindustri. Adapun Ngadaur merupakan *social enterprise* yang bergerak dalam edukasi lingkungan dan pengelolaan sampah rumah tangga melalui pengembangan sistem biogas skala kecil berbasis komunitas. Ketiga tim ini memberikan variasi pendekatan yang berbeda dalam pengembangan solusi, mulai dari pengolahan limbah organik hingga upaya memperpanjang masa simpan pangan. (Diskominfo Kota Bandung, 2024).

Dalam pelaksanaan program juga menghadapi beberapa tantangan, terutama berkaitan dengan partisipasi peserta dan kebutuhan pendanaan program. Berdasarkan hasil wawancara, jumlah peserta yang mengikuti program belum sepenuhnya sesuai dengan

target yang direncanakan sehingga diperlukan penguatan sosialisasi dan penyesuaian dalam proses pelaksanaan program. Selain itu, tahapan lanjutan kegiatan di Melbourne juga memerlukan dukungan pendanaan yang cukup besar, khususnya terkait kebutuhan biaya perjalanan, tiket, dan pengurusan visa bagi peserta yang melanjutkan program ke Melbourne. Dalam pelaksanaannya, sebagian besar pembiayaan keberangkatan peserta masih ditanggung secara mandiri oleh masing-masing peserta (Mugia, 2026).

Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, program tetap dapat dilaksanakan hingga tahap akhir di Melbourne yang diikuti oleh tiga tim asal Kota Bandung, yaitu Envmission, BIKI (*Bisa Kita*), dan Ngadaur setelah sebelumnya melalui proses seleksi, pendampingan, dan pengembangan solusi sejak Februari 2025. Pada tahap lanjutan di Melbourne, tiga tim asal Kota ini kemudian mengikuti final pitching untuk mempresentasikan solusi pengelolaan *food waste* yang telah mereka kembangkan selama program berlangsung. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian akhir *Melbourne–Bandung Food Waste Challenge 2025* sekaligus ruang pertemuan antara peserta, mentor, mitra industri, dan penyelenggara program dalam mengevaluasi potensi implementasi solusi yang dikembangkan. Selain menjadi ajang presentasi solusi, tahapan akhir program ini juga diarahkan untuk membuka peluang pengembangan *pilot project* bersama mitra industri sebagai tindak lanjut kolaborasi pengelolaan *food waste* antara Kota Bandung dan Kota Melbourne (Mugia, 2026).

Seluruh proses ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Melbourne–Bandung Food Waste Challenge 2025* bergantung pada keterhubungan antara pelaksanaan kegiatan, koordinasi antaraktor, dan ketersediaan sumber daya. Koordinasi antara pemerintah kota, Rocket Seeder, mitra industri, institusi pendidikan, dan jaringan inovasi memungkinkan kesepakatan kerja sama diterjemahkan ke dalam tahapan seleksi, pendampingan, pengembangan solusi, hingga presentasi inovasi di Melbourne. Di sisi lain, keterbatasan jumlah peserta dan dukungan pendanaan mendorong perlunya perluasan sosialisasi dan jejaring. Biaya perjalanan, tiket, dan pengurusan visa yang sebagian besar ditanggung peserta juga menjadi pertimbangan dalam mengikuti tahapan lanjutan di Melbourne. Hal ini menunjukkan bahwa kelancaran pelaksanaan program tidak hanya ditentukan oleh koordinasi antaraktor, tetapi juga oleh dukungan sumber daya yang memadai. Selain itu, program ini membuka peluang bagi peserta untuk mengembangkan solusi melalui *pilot project* bersama mitra industri sebagai tindak lanjut kerja sama antara Kota Bandung dan Kota Melbourne. Pelaksanaan program ini telah menghasilkan pengembangan dan presentasi solusi pengelolaan *food waste* oleh tiga tim asal Bandung di Melbourne yang menjadi landasan bagi pengembangan kolaborasi lebih lanjut antara peserta dan mitra industri untuk mendorong penerapan solusi dalam praktik. Dengan demikian, implementasi kerja sama Bandung–Melbourne dalam pengelolaan *food waste* tidak hanya menunjukkan pelaksanaan program secara nyata, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kerja sama antarkota dijalankan melalui koordinasi, penggunaan sumber daya, hingga pendanaan untuk mendukung keberlanjutan kolaborasi antara kedua kota.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dan Kota Melbourne dalam pengelolaan *food waste* berlangsung secara bertahap dengan melibatkan berbagai aktor dari lintas sektor melalui program *Melbourne–Bandung Food Waste Challenge 2025*. Solusi yang dihasilkan oleh tiga tim asal Bandung di Melbourne, kemudian memperlihatkan pentingnya koordinasi dan keterlibatan lintas sektor dalam menerjemahkan perhatian terhadap isu lingkungan yang kemudian diwujudkan dalam agenda bersama yang menghasilkan kegiatan konkret dalam pengelolaan lingkungan

perkotaan. Capaian ini menjadi landasan bagi penguatan kerja sama lanjutan dengan penerapan solusi yang telah dikembangkan dan evaluasi hasilnya secara berkelanjutan.

Pernyataan Transparansi Penelitian dan Etika Penulis (Wajib): [6.1]

1. **Pernyataan Mengenai Penggunaan Artificial Intelegent (AI)**
   Penulis wajib menjelaskan apakah kecerdasan buatan (AI) digunakan dalam proses penyusunan artikel. Jika ya, penulis harus menjelaskan secara singkat tujuan dan sifat penggunaannya, seperti untuk membantu penyuntingan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, atau pemrosesan data.
2. **Pernyataan Kontribusi Penulis**
   Penulis harus menjelaskan kontribusi masing-masing penulis dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel, mulai dari perumusan ide, pengumpulan dan analisis data, hingga penulisan dan penyempurnaan naskah.
3. **Pernyataan Pendanaan**
   Penulis wajib mencantumkan sumber dan nomor hibah pendanaan penelitian jika penelitian tersebut menerima pendanaan. Jika penelitian tidak menerima pendanaan, pernyataan berikut dapat disertakan: “Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pemerintah, entitas swasta, atau sumber pendanaan lainnya.”
4. **Pernyataan Conflict of Interest**
   Para penulis wajib menyatakan apakah terdapat konflik kepentingan yang terkait dengan penelitian atau publikasi artikel ini. Jika tidak ada konflik kepentingan, pernyataan berikut dapat dicantumkan: “Para penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang terkait dengan penelitian ini atau publikasi artikel ini.”

DAFTAR PUSTAKA

Amaranti, R., Achiraeniwati, E., As’ad, N., & Nasution, A. (2016). Pendampingan masyarakat dalam pengolahan sampah organik rumah tangga untuk mendukung program urban farming. Ethos (Jurnal Penelitian dan Pengabdian), 4(2), 283–290. https://doi.org/10.29313/ethos.v0i0.1973

Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bandung. (2025a). Melbourne–Bandung Food Waste Challenge overview.

Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bandung. (2025b). Summary brief Melbourne–Bandung Food Waste Challenge 2025.

Bainus, A., Yulianti, D., Sari, D. S., Setyaka, V., & Rahmatika, W. O. K. (2025). Women’s leadership in cooperative and social movement in the issue of food waste: Evidence from Bandung City. World Development Sustainability, 6, Article 100219. https://doi.org/10.1016/j.wds.2025.100219

Choochote, P., & Supakata, N. (2025). Urban food waste generation and sustainable management strategies: A case study of Nonthaburi Municipality, Thailand. Scientific Reports, 15, Article 18405. https://doi.org/10.1038/s41598-025-00682-3

City of Melbourne. (2019). Waste and resource recovery strategy 2030. https://participate.melbourne.vic.gov.au/waste-resource-strategy

Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3rd ed.). SAGE Publications.

Deng, W.-S., & Lin, Y.-C. (2025). Determinants of municipal-level household food waste. Agribusiness, 41(1), 106–126. https://doi.org/10.1002/agr.21878

Diskominfo Kota Bandung. (2024, April 26). Kota Bandung dan Melbourne jalin kerja sama di sejumlah bidang. Portal Jabar. https://jabarprov.go.id/berita/kota-bandung-dan-melbourne-jalin-kerja-sama-di-sejumlah-bidang-13218

Humas Kota Bandung. (2024, July 22). Pemkot Bandung kejar pengolahan 500 ton sampah per hari.

Kusnetsov, A. (2015). Theory and practice of paradiplomacy: Subnational governments in international affairs. Routledge.

Landells, E., Naweed, A., Karunasena, G. G., Pearson, D. H., & Oakden, S. (2024). Food waste tectonics: Points of friction between policy push and practice pull in council-led household-food-waste interventions in Australia. Journal of Environmental Management, 357, Article 120717. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.120717

Liu, X., & Hu, X. (2018). Are "sister cities" from "sister provinces"? An exploratory study of sister city relations (SCRs) in China. Networks and Spatial Economics, 18(3), 473–491. https://doi.org/10.1007/s11067-018-9408-z

Martianto, D., Diana, R., Baliwati, Y. F., Sukandar, D., & Hendriadi, A. (2024). The quantity and composition of household food waste: Implications for policy. PLOS ONE, 19(6), Article e0305087. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0305087

Paulo, S. (2014). International cooperation and development: A conceptual overview. German Development Institute.

Rocket Seeder. (n.d.). Accelerator program for food & agriculture startups. https://www.rocketseeder.com/

Sasisuci, D. A., Nurhayati, A., & Nikmawati, E. E. (2025). Maternal food literacy in reducing household food waste in Bandung City. Media Pendidikan Gizi dan Kuliner, 17(2), 95–105. https://doi.org/10.17509/mpgk.v17i2.95603

Sekilas Jabar. (2019, February 28). Pemkot Bandung dan Melbourne gelar datathon.

Swamilaksita, P. D., Baliwati, Y. F., Martianto, D., & Briawan, D. (2025). Determinants of food management behavior on food waste reduction and household food security through expenditure efficiency and energy consumption. Media Kesehatan Masyarakat Indonesia, 21(2), 101–112. https://doi.org/10.30597/mkmi.v21i2.44371

United Nations Environment Programme. (2024). Food waste index report 2024: Think eat save—Tracking progress to halve global food waste. https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/45230

Victorian Cleantech Cluster. (2021). Victorian Cleantech Expo 2021: A brilliant beginning. https://www.victoriancleantech.org.au/victorian-cleantech-expo-2021

Widarmanti, T., Rahayu, A., Adi Wibowo, L., & Aziz Pratiwi, N. (2026). Dimensions of systemic failure in traditional market waste management: A scoping review of empirical studies in Bandung Raya Metropolitan Area. Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting, 7(3), 1909–1923. https://doi.org/10.38035/dijefa.v7i3.7043